

**PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Kasus Pada Desa-desa di Kabupaten Ngawi)**

**Ali Tiyas Nugroho<sup>1)</sup>, M. Agus Sudarajat<sup>2)</sup>, Muhammad Cholis<sup>3)</sup>,  
Rihan Mustafa Zahri<sup>4)</sup>**

<sup>1 2</sup>Program Studi Akuntansi, Universitas PGRI Madiun  
E-mail: [agus.sudrajat@unipma.ac.id](mailto:agus.sudrajat@unipma.ac.id)

<sup>3</sup>Program Studi Akuntansi, Universitas ITB AAS Indonesia

<sup>4</sup>Program D3 Manajemen Pajak, Universitas PGRI Madiun

**Abstract**

*The purpose of this study was to determine and analyze the influence of community participation, internal control systems and the use of information technology on village fund management accountability with professionalism as a moderating variable (a case study in villages in Ngawi district). The population in this study were village officials in 5 sub-districts receiving the largest allocation of village funds in Ngawi Regency amounted to 568 people and the sample was 104. The method in determining the sample used in this study was purposive sampling, while the data processing method used was multiple regression analysis. and MRA test. This study uses a survey method using primary data obtained from questionnaires distributed to respondents. The results of this study indicate that the community participation variable affects the accountability of village fund management, the internal control system and the use of technology do not affect the accountability of village fund management. The moderating variable of professionalism is significant in moderating the effect of the use of information technology on village fund management accountability, but professionalism is not able to moderate the effect of community participation and internal control systems on village fund management accountability..*

**Keywords :** *Community Participation, Internal Control System, Utilization of Information Technology, Village Fund Management Accountability*

**1. PENDAHULUAN**

Dengan disahkannya Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang dana desa yang diambil dari anggaran pendapatan dan belanja negara membuktikan keseriusan pemerintah pusat dalam kelangsungan pembangunan nasional. Tujuan utama disahkannya undang-undang desa ialah untuk menjadikan desa lebih mandiri melalui berbagai kegiatan dan program pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa termasuk didalamnya adalah Pengelolaan Keuangan Desa. Dari tahun ketahun jumlah dana yang diberikan dari Negara ke desa sangat besar tentunya diperlukan pertanggungjawaban yang besar pula. Pemerintah Pusat telah menganggarkan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa.

(Sumarto, 2022) Pada tahun 2018, Pemerintah Pusat telah menganggarkan sebesar Rp60 triliun, realisasi dana desa yang mencapai Rp59,86 triliun atau 98,77%. Pada tahun 2019, Dana Desa meningkat menjadi sebesar Rp70 triliun, dengan realisasi dana desa yang telah dikucurkan hingga Agustus 2019 mencapai Rp42,2 triliun atau 60,29%, dan di tahun 2020 kembali meningkat menjadi Rp72 triliun. Dana desa tersebut ditransfer ke 434 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di 33 provinsi, dengan jumlah desa mencapai 74 ribu desa. Itupun

belum termasuk dana-dana lainnya yang mengalir ke desa baik berupa alokasi dana desa, bantuan keuangan, dana bagi hasil ataupun bantuan lainnya (hibah) untuk pembangunan perdesaan (BPKP, 2019). Apabila dilihat dari rata-rata dana desa yang diterima per desa selama tiga tahun terakhir menunjukkan trend peningkatan. Tahun 2018 setiap desa mendapatkan rata-rata alokasi dana desa sebesar Rp800,4 juta, tahun 2019 sebesar Rp933,9 juta, dan tahun 2020 sebesar Rp960,6 juta, untuk Provinsi Jawa Timur dana desa yang diberikan oleh negara per juni 2021 sebesar Rp7,659 triliun dan dalam rentang 2015-2021 jika ditotal adalah sebesar Rp 34,906 triliun. Hal ini tentu menjadi kesempatan bagi desa untuk mengelola pemerintahannya sendiri dan berbagai sumber daya alam yang dimilikinya, termasuk juga keuangan dan kekayaan milik desa. Berikut adalah tempat dan anggaran dana desa yang diberikan pemerintah Kabupaten Ngawi ke 5 Kecamatan terbesar dengan desa lebih dari 10

Tabel 1

Alokasi Anggaran Dana Desa 5 Kecamatan Kabupaten Ngawi 2021

| Kecamatan  | Jumlah Desa | Jumlah Alokasi Dana Desa |
|------------|-------------|--------------------------|
| Sine       | 15          | 13,445,406,000           |
| geneng     | 13          | 10,931,219,000           |
| Karangjati | 17          | 14,681,553,000           |
| Ngawi      | 12          | 11,333,196,000           |
| Paron      | 14          | 14,051,255,000           |

Sumber : PERBUP 1 Tahun 2021 Kabupaten Ngawi

Dengan aliran dana yang sangat banyak diperlukan tanggung jawab yang besar pula ini menjadi hal yang sangat dikhawatirkan dalam pengelolaan dana desa salah satu hal yang sering terjadi ialah tindak kecurangan korupsi, tentu dengan dana yang sangat besar tidak menutup kemungkinan terjadinya tindak korupsi ini sebagai contoh yang terjadi di kabupaten Ngawi ialah kasus korupsi yang melibatkan Sutrisno mantan Kepala Desa Sidomulyo, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi ia ditahan oleh pihak kejaksaan negeri Ngawi telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi pada anggaran dana desa yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 218 juta dari tahun 2015 hingga tahun 2020 (Ramadan, 2021).

Menurut (Wiguna & Dwilingga, 2020) Akuntabilitas ialah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban kinerja dan tindakan seseorang atau badan hukum atau kepala organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau wewenangan untuk meminta pertanggungjawaban, didalam pengelolaan keuangan desa terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa hal ini disebutkan dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 1 ayat 6. Dalam tercapainya akuntabilitas masyarakat juga berperan penting untuk ikut serta dalam pembangunan dan pelaksanaan program-program yang diselenggarakan oleh desa.

Menurut (Atiningsih & Ningtyas, 2019) Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan pada langkah pembangunan, dari pengambilan keputusan sampai pengawasan yang mana masyarakat tidak hanya sebagai penerima sarana dan manfaat, tetapi juga sebagai subjek pembangunan berkelanjutan. Partisipasi Masyarakat diperlukan agar dapat tercapainya akuntabilitas pengelolaan dana desa, partisipasi masyarakat sangat diperlukan bukan hanya sebagai pelaksana program kerja tapi masyarakat berperan juga

dalam memantau pelaksanaan program apakah sudah sesuai dengan apa yang dianggarkan atau tidak sehingga masyarakat dapat melihat sejauh mana akuntabilitas pengelolaan dana desa tersebut (Kristiyanti, 2021). Setiap warga negara mempunyai hak dan suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui perantara untuk menyampaikan kepentingannya. Partisipasi dibangun berdasarkan kebebasan berbicara atau berpendapat dan ikut serta dan berpartisipasi melalui kritik membangun dalam pengelolaan dana desa. Kritik dari masyarakat bila dicerna dengan baik dapat dijadikan tolak ukur dalam hal akuntabilitas berjalan baik atau tidak. Partisipasi didalam pengelolaan ialah penentuan kebijakan publik yang menjadi kekuatan untuk mendorong dan mempercepat terpenuhinya prinsip akuntabilitas dari penyelenggaraan pemerintah di desa.

(Widyatama & Novita, 2017) Dalam pemerintahan desa diperlukan juga sistem pengendalian internal, sistem pengendalian internal ialah proses dimana suatu organisasi menjalankan aktivitas secara efisien dan efektif, akuntabilitas keuangan dapat diandalkan serta patuh kepada hukum dan regulasi yang ada (Budiyono, et al, 2021). (Aramide et al., 2015) pengendalian internal dibutuhkan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi dengan melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Lima unsur yang terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian internal. selain pemanfaatan teknologi dan sistem pengendalian internal (Kusuma, et al, 2021).

Menurut (Warsita, 2011) teknologi informasi ialah sarana dan prasarana yang meliputi hardware, software dan useware yang digunakan untuk memperoleh, mengelolah, menafsirkan, menyimpan, mengorganisasikan, mengirimkan dan menggunakan data sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

(Mentari Tumbel, 2017) Pengelolaan dana desa di saat ini erat kaitannya dengan pemanfaatan teknologi informasi hal ini juga menjadi perantara pemerintah desa dengan masyarakat mulai dari pemberitahuan informasi mengenai kegiatan-kegiatan desa yang akan diselenggarakan sampai dengan media informasi tentang alur anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) yang biasanya dipampang di sistem keuangan desa (SISKEUDES) atau website-website desa, hal ini biasanya juga menjadi tolak ukur transparansi yang ada di desa.

Menurut (Suparman, 2014) penggunaan teknologi informasi meliputi pengolahan data, pengolahan informasi, manajemen sistem, proses kerja elektronik dan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi sehingga agar pelayanan publik dapat diakses dengan mudah dan murah oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berupa komputer membantu aparat desa dalam mengelola dokumen desa secara keseluruhan. Komputer ini juga digunakan sebagai alat bantu kerja dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah desa, agar aparat desa dapat menginput data lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan cara manual.

Pada Mei tahun 2015 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Barat memperkenalkan sistem keuangan desa yang mana aplikasi ini adalah bentuk percobaan di lingkungan BPKP. Selanjutnya pada tahun 2015 juga Aplikasi tersebut berhasil diimplementasikan. Aplikasi siskeudes dirancang agar meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa (BPKP, 2019).

(Pratiwi & Pravasanti, 2020) Siskeudes digunakan pemerintah desa untuk membantu pengelolaan dana desa sehingga dengan adanya siskeudes diharapkan dapat memberikan pengaruh yang positif bagi pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa, saat ini banyak aplikasi siskeudes dilengkapi dengan CMS (cash management system), aplikasi CMS sangat membantu desa dalam pengelolaan keuangan desa dikarenakan penatausahaan keuangan desa

lebih teratur dan lebih mudah membuat laporan pertanggungjawaban desa, manfaat lain dari aplikasi CMS ini ialah menghilangkan kebocoran anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa).

Penelitian ini didasarkan pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Arfiansyah, 2020) “Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada variabel independen dimana penelitian ini menambahkan variabel lain yaitu pemanfaatan teknologi informasi serta menyimpulkan agar lebih efektif dari variabel penelitian yang terdahulu menjadi berbagi pengetahuan. Dan menggunakan variabel dependen akuntabilitas pengelolaan dana desa (Studi kasus pada Desa-desa di Kabupaten Ngawi).

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif dengan populasi aparatur desa dalam Kecamatan yang memiliki jumlah desa dan alokasi dana desa 5 terbesar se-Kabupaten Ngawi. Dalam penelitian ini sampel yang digunakan ialah aparatur desa yang berada di Kabupaten Ngawi yang meliputi Kepala Desa, Sekertaris Desa dan Bendahara Desa (Kepala Urusan Keuangan).

Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Purposive Sampling. Kriteria dalam menentukan sampel adalah aparatur desa pemegang pengelola keuangan desa yang sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Keuangan. Teknik pengambilan data dalam penelitian ini adalah dengan memberi responden pertanyaan berupa kusioner. Kusioner ini berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai indikator Akuntabilitas Pengelolaan dan desa pada Desa di Kabupaten Ngawi. Hasil jawaban dari responden akan diukur menggunakan skala Likert dimulai dari 1 sampai 5.

Uji analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda regresi berganda menggunakan metode penerapan jumlah variabel bebas atau independent yang digunakan yakni lebih dari satu dan mempengaruhi satu variabel tak bebas atau dependent. Instrumen penelitian merupakan suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Secara spasifik semua fenomena ini disebut variabel penelitian (Sugiyono, 2007) Instrumen atau alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah kusioner yang berisi pertanyaan dan pernyataan untuk memperoleh data tentang Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Jawaban responden akan diberikan skor, dan skor yang digunakan ialah skala Likert. Skala Likert yaitu skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian, fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian (Sugiyono, 2017). Dengan skala Likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan. Penentuan skor pada skala Likert dengan menggunakan skala 1-5 yang mempunyai gradasi dari sangat setuju sampai sangat tidak setuju.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Hasil penelitian

Hasil uji menggunakan metode Analisis regresi linier berganda, persamaan regresi linier berganda bertujuan untuk mengetahui perubahan nilai variabel dependen akibat dari perubahan nilai variabel independen.

Table 2 Uji Analisis regresi liier berganda

| Variabel                             | t      | Sig.  | Hasil             |
|--------------------------------------|--------|-------|-------------------|
| Partisipasi Masyarakat (X1)          | 6,729  | 0,000 | Berpengaruh       |
| Sistem Pengendalian Internal (X2)    | -0,931 | 0,354 | Tidak Berpengaruh |
| Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3) | 0,599  | 0,550 | Tidak Berpengaruh |

Sumber : Data Primer, diolah 2022

#### 3.2. Pembahasan

##### **Pengujian hipotesis 1: Partisipasi Masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.**

Pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa diperoleh nilai t-hitung untuk variabel partisipasi masyarakat sebesar (6,230) dan signya adalah 0,000. Dalam hal ini t-hitung (6,729) > t-tabel 1,660 dan mempunyai angka signifikan sebesar 0,000 > 0,05; sehingga dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, dengan demikian H1 diterima. Diterimanya Hipotesis 1 (H1) dalam hal ini teori stewardship menurut Donaldson & Davis, (1991) bahwa manajemen dapat bertindak dengan baik untuk kepentingan banyak pihak, dengan cara ini membuat hubungan yang kuat antara kepuasan organisasi dan kemakmurannya. Pencapaian kesuksesan dapat dicapai dengan meningkatkan utilitas para eksekutif dan kepala. Kemajuan manajemen juga mencakup kerjasama dengan masyarakat dalam memutuskan, merencanakan rencana keuangan, dan melaksanakan rencana keuangan yang berhubungan dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini berdampak pada terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa sehingga pengelolaan dana desa

Ikut sertanya masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan kontrol dapat mendorong pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kepercayaan yang diberikan masyarakat dalam hal akuntabilitas pengelolaan dana desa yang baik. Keikutsertaan masyarakat dalam hal ini adalah ikut serta dalam hal fisik dan mental dalam kegiatan bersama, sebagai pengakuan atas hak istimewa dan komitmen setiap penduduk, terutama sejauh untuk akuntabilitas pengelolaan dan desa.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Dewi & Erlinawati, 2020) dan (Sarah et al., 2020). Namun penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh (Giriani & Burhany, 2021) yang menyatakan partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kelompok masyarakat juga mengambil bagian pengawasan pengelolaan dana desa, sehingga setelah mendapat tekanan dan permintaan dari masyarakat setempat mengenai pengelolaan dana desa, timbul rasa kewajiban untuk bertanggungjawab terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Masyarakat yang terlibat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa haruslah mengetahui

secara keseluruhan perencanaan dan pelaksanaan pada pengelolaan dana desa. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat maka semakin tinggi pula akuntabilitas pengelolaan dana desa.

### **Pengujian hipotesis 2: Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan pengujian tersebut diperoleh nilai t-hitung untuk variabel Sistem Pengendalian Internal sebesar (-0,931) dan signya adalah 0,354. Dalam hal ini t-hitung (-0,931) < t-tabel 1,660 dan mempunyai angka signifikan sebesar 0,354 > 0,05; sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, dengan demikian H2 ditolak. Ditolaknya Hipotesis 2 (H2) dalam hal ini teori stewardship berakar dari model perilaku manusia, sebagai situasi dimana tujuan-tujuan individu tidak memotivasi manajemen yaitu aparatur desa (steward), tetapi lebih kepada sasaran hasil atau output utama mereka untuk kepentingan organisasi. Apabila terjadi selisih atau perbedaan pendapat antara steward dengan pemilik modal yaitu masyarakat (principal), maka steward bukan membantahnya tetapi memperbaiki kembali, karena steward lebih memandang usaha untuk pencapaian di masa mendatang dengan selarasnya tujuan organisasi. Kesuksesan organisasi menggambarkan adanya maksimalisasi antara principal dan steward (Donaldson & Davis, 1991).

Hal ini sejalan dengan penelitian Hindriani et al., (2020) yaitu pelaksanaan sistem pengendalian intern desa terbatas pada internalisasi SPI ke dalam seluruh proses kerja di organisasi, melalui unsur: 1) Lingkungan Pengendalian, dengan telah diterapkannya sebagai soft control dan mendapatkan porsi terbesar untuk membangun etika, moral, integritas, kejujuran, disiplin, kompetensi, komitmen dari para pelaksana kegiatan untuk dapat melaksanakan tata kelola yang didukung dengan hard control yang baik, disini masih kurang adanya komitmen dari Kepala Dinas untuk menerapkan SPI sesuai dengan ketentuan yang berlaku 2) Penilaian Resiko, dengan sub unsur identifikasi dan analisa resiko yang telah dilakukan, namun belum dilakukan pemetaan yang terdokumentasi 3) Kegiatan Pengendalian, dimana pelaksanaan review masih terbatas pada formalitas pemenuhan terhadap permintaan data dari DPKD 4) informasi sebagai alat komunikasi yang efektif dengan tingkat akurasi yang tinggi yang di beberapa desa masih banyak komponen pengendalian yang belum dilaksanakan.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal tidak berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Mutmainah & Pramuka, 2017) dan (Nafsiah & Diana, 2020).

### **Pengujian hipotesis 3: Pemanfaatan Teknologi Informasi Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan pengujian tersebut diperoleh nilai t-hitung untuk variabel pemanfaatan teknologi informasi sebesar (0,599) dan signya adalah 0,550. Dalam hal ini t-hitung (0,599) < t-tabel 1,660 dan mempunyai angka signifikan sebesar 0,550 < 0,05; sehingga dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, dengan demikian H3 ditolak. Ditolaknya hipotesis 3 (H3) Hal ini teori stewardship, dengan memanfaatkan teknologi informasi secara langsung aparatur lebih terbantu dalam pengelolaan dana desa, sehingga aparatur akan dengan mudah menjalankan kewajibannya sebagai pemberi pelayanan sebagai wujud akuntabilitas kepada masyarakat. Ketersediaan perangkat komputer yang memadai akan meningkatkan akuntabilitas

pengelolaan dana desa dan jika sebaliknya pengolahan data tidak didukung dengan perangkat memadai maka akuntabilitas pengolahan dana desa akan mengalami kemunduran.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Pahlawan et al., 2020) belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi yang disebabkan oleh kurangnya kemampuan olah data oleh aparatur desa dan kurangnya perangkat pengolah laporan keuangan yang digunakan aparatur desa untuk mengelola dan melaporkan laporan keuangan dana desa. kurangnya kemampuan olah data dikarenakan mayoritas responden adalah dengan pendidikan setara SMA yang dapat dilihat dalam data statistik responden yang mana untuk dalam hal kemampuan mengoperasikan perangkat komputer dapat dikatakan kurang. Selain hal tersebut jumlah ketersediaan komputer di dalam pemerintahan desa dapat dikatakan kurang karena dari data yang dilihat dilapangan menunjukkan hanya terdapat beberapa perangkat komputer yang berfungsi dan hanya beberapa saja yang dapat mengoperasikannya. Selain dapat digunakan untuk mengelola laporan keuangan dana desa, pemanfaatan teknologi informasi penting bagi aparatur untuk mengirimkan segala informasi keuangan pada pihak pemerintah daerah atau pemerintah di atasnya.

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan dilakukan pengujian terhadap keenam hipotesa dengan menggunakan SPSS, serta telah dilakukan pembahasan terhadap hasil analisa tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, Sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Ikut sertanya masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan kontrol dapat mendorong pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kepercayaan yang diberikan masyarakat dalam hal akuntabilitas pengelolaan dana desa yang baik. Keikutsertaan masyarakat dalam hal ini adalah ikut serta dalam hal fisik dan mental dalam kegiatan bersama, sebagai pengakuan atas hak istimewa dan komitmen setiap penduduk, terutama sejauh untuk akuntabilitas pengelolaan dan desa. Hal ini mengandung implikasi bahwa dimasa depan masyarakat dapat meningkatkan partisipasinya terhadap akuntabilitas dana desa karena hal tersebut bisa berdampak dana desa akan lebih transparansi kepada masyarakat desa sehingga masyarakat dapat mempercayai kinerja aparatur desa. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penyebaran kuesioner secara langsung kepada responden yang merupakan aparatur desa. Dimana responden tidak setiap saat berada di tempat, sehingga peneliti memerlukan waktu untuk pengisian kuesioner tersebut.

Untuk penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat mengembangkan pernyataan-pernyataan dalam kuesioner yang diajukan kepada responden. Penelitian ini juga menyarankan agar penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel-variabel penelitian ini serta mengembangkan variabel lain yang relevan dalam menjelaskan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Aramide, S. F., Mustapha, &, & Bashir, M. (2015). the Effectiveness of Internal Control System and Financial Accountability At Local Government Level in Nigeria. *International Journal of Research in Business Management*, 3(8), 2321–2886.
- Arfiansyah, M. A. (2020). Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Journal of Islamic Finance and Accounting*, 3(1), 67–82.
- Atiningsih, S., & Ningtyas, A. C. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Aparatur Pemerintah Desa Se-Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali). *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 10(1), 2015–2019.
- BPKP. (2019). *Pengawasan Keuangan Desa dengan Aplikasi SISKEUDES*. BPKP. <https://www.bpkp.go.id/sakd/konten/2448/Leaflet-Simda-Desa.bpkp>
- Budiyono, Muhammad Tho'in, Dewi Muliasari, and Serly Andini Restu Putri. "An analysis of customer satisfaction levels in islamic banks based on marketing mix as a measurement tool." *Annals of the Romanian Society for Cell Biology* (2021): 2004-2012.
- Dewi, N. W. K. P., & Erlinawati, N. W. A. (2020). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kompetensi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan dana desa pada kantor desa se-kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar. *Hita Akuntansi Dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia*, Juli, 524–543.
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. *Australian Journal of Management*, 16(1), 49–64. <https://doi.org/10.1177/031289629101600103>
- Giriani, M., & Burhany, D. I. (2021). *Pengaruh Kompetensi Aparatur , Komitmen Organisasi , dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Batujajar The Effect of Apparatus Competence , Organizational Commitment , and Community Participation on the Account*. 1(3), 480–492.
- Hindriani, N., Hanafi, I., & Domai, T. (2020). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Spip) Dalam Perencanaan Dan Pelaksanaan Anggaran Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun. *Focus Magister Ilmu Administrasi Upmi*, 15(3), 1–9. <http://journal.upmi.ac.id/index.php/fmiau/article/view/149>
- Kristiyanti, L. M. S. (2021). The implementation of good corporate governance, village apparatus performance, organizational culture, and its effects against village fund management accountability (Case study of Tulung District, Klaten Regency). *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 1985-1996.
- Kusuma, I. L., Dewi, M. W., & Tho'in, M. (2021). Analysis of the effect of human resources competency, utilization of technological information, and internal control systems on the value of financial reporting information. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 14628-14638.
- Mentari Tumbel, S. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di DesaTumaluntung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Politico*, 6(1), 1–21.
- Mutmainah, I., & Pramuka, B. A. (2017). Penerapan akuntabilitas pengelolaan dana desa dan sistem pengendalian intern pemerintah di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi (JEBA)*, 19(04), 1–12.
- Nafsiah, S. N., & Diana, M. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Indralaya. *Jurnal Ilmiah Bina Manajemen*, 3(2), 104–112.

- Pahlawan, E. W., Wijayanti, A., & Suhendro, S. (2020). Pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Indonesia Accounting Journal*, 2(2), 162. <https://doi.org/10.32400/iaj.29261>
- Pratiwi, D. N., & Pravasanti, Y. A. (2020). Analisis Penggunaan Siskeudes dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(2). <https://doi.org/10.29040/jap.v20i2.770>
- Ramadan, A. A. M. (2021). *Mantan Kepala Desa Sidomulyo Ngawi Ditahan Perkara Korupsi*. SuaraJatim.Id. <https://jatim.suara.com/read/2021/09/12/062500/mantan-kepala-desa-sidomulyo-ngawi-ditahan-perkara-korupsi>
- Sarah, S., Taufik, T., & Safitri, D. (2020). Pengaruh kompetensi aparatur, komitmen organisasi, pemanfaatan teknologi informasi, partisipasi masyarakat, dan SPI terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di kabupaten indragiri hulu. *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(4), 330–342.
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sumarto, S. W. (2022). *Akuntabilitas Dana Desa*. <https://www.bpkp.go.id/jateng/konten/3544/AKUNTABILITAS-DANA-DESA>
- Suparman, E. W. (2014). Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng. *E-Journal SI Akuntansi*, 2, 1–10.
- Warsita, B. (2011). Landasan Teori dan Teknologi Informasi dalam Pengembangan Teknologi Pembelajaran. *Jurnal Teknodik*, 15(1), 84–96. <http://jurnalteknodik.kemdikbud.go.id/index.php/Teknodik/article/view/64>
- Widyatama, A., & Novita, L. (2017). *Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa ( ADD )*. 02(02), 1–20.
- Wiguna, K. Y., & Dwilingga, E. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Balance : Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 5(2), 167. <https://doi.org/10.32502/jab.v5i2.2883>